Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

POLITIK, DEMOKRASI DAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Febri Aulia

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: lia.febriaulia@gmail.com

Chantika Dara Sugianda

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: chantikadarasugianda@gmail.com

Aulia Restiani

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: auliarestiani10@gmail.com

Elvina Kumalasari

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: elvinakumalasari001@gmail.com

Kayla Nazwaluna

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: kaylanazwaluna@gmail.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini bermaksud mendefinisikan persepsi terkait politik, demokrasi dan HAM dalam perspektif Islam. Islam merupakan salah satu agama yang bersifat universal. Kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kerap dikritisi jajaran aktivis agama Islam dan para ulama di Indonesia. Banyaknya agama dan aliran kepercayaan lainnya memberikan perhatian yang kurang positif terhadap Islam. Islam merupakan pandangan hidup bagi umat muslim yang komprehensif, tidak ada yang menjadi alasan mengapa politik dan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Akan tetapi, pertentangan politik dalam perspektif Islam disertai dengan keterlibatan para tokoh ulama dan aktivis Islam lainnya, masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini. Jika ditinjau dari sisi positifnya, eksistensi ulama dalam politik berpengaruh terhadap jalannya politik Islam dari waktu ke waktu, sikap kepemimpinan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang telah hadir semenjak era kenabian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai ppolitik, demokrasi dan HAM dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian pustaka (library research). Data yang diperoleh kemudian dianilisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal-jurnal dan ensiklopedia yang memiliki keterikatan dengan tema yang dibahas. Adapun hasilnya adalah perspektif Islam dan Barat mengenai politik, demokrasi, dan HAM saling bertolak belakang. Dampak dibuatnya kajian ini agar umat Islam dapat berdemokrasi sesuai dengan ajaran Islam dan tidak terpengaruh oleh sistem demokrasi Barat.

Kata Kunci: Politik, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Islam.

1. Pendahuluan

Artikel ini ditulis guna menelaah politik, demokrasi, dan HAM dalam perspektif Islam. Islam merupakan salah satu agama yang bersifat universal.

Kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kerap dikritisi jajaran aktivis agama Islam dan para ulama di Indonesia. Banyaknya agama dan aliran kepercayaan lainnya memberikan perhatian yang kurang positif terhadap Islam.

Islam merupakan pandangan hidup bagi umat muslim yang komprehensif, tidak ada yang menjadi alasan mengapa politik dan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Akan tetapi, pertentangan politik dalam perspektif Islam disertai dengan keterlibatan para tokoh ulama dan aktivis Islam lainnya masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini. Jika ditinjau dari sisi positifnya, eksistensi ulama dalam politik berpengaruh terhadap jalannya politik Islam dari waktu ke waktu, sikap kepemimpinan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang telah hadir semenjak era kenabian.

Dalam konteks yang lebih luas, demokrasi didefinisikan sebagai sebuah paham dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kehadiran akivis Islam dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam berdemokrasi melatarbelakangi kehadiran warna baru demokrasi di Indonesia. Islam dan demokrasi tidak memilki keterikatan dari segala aspek. Hal tersebut melatarbelakangi bahwa membandingkan antara Islam dan demokrasi tidaklah tepat (Abdul Jalil, 2020 : 431).

Adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, martabat dan kesadaran manusia untuk menghormati sesamanya yang sesuai secara doktrinal antar umat beragama melatarbelakangi lahirnya Hak Asasi Manusia di dunia. Dalam Islam, Allah SWT memberikan kebebesan seluas-luasnya kepada manusia untuk memilih tindakannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang senantiasi dibarengidengan tanggung jawab menurut Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H (dalam Fuadi, 2022).

2. Kerangka Teori

Sudut Pandang Islam dalam Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Politik berasal dari kata Yunani "polis' yang berarti kota atau negara kota. Sedangkan demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Politik demokrasi merupakan bentuk politik yang berfokus pada partisipasi politik oleh seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan penentuan arah kebijakan negara. Di mana setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dalam memberikan suara dan memilih perwakilan mereka, sehingga rakyat memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan politik.

Dalam islam, politik demokrasi dijalankan berdasarkan pada hukum yang adil, serta memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum dan mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, politik demokrasi juga harus memperhatikan dan melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan HAM tetap menjadi fokus utama dalam politik demokrasi yang diterapkan secaa adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Penerapan politik, demokrasi dan hak asasi manusia sangat diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, karena di dalamnya terdapat berbagai keselarasan sesuai dengan kaidah-kaidah terpuji yang dimiliki Islam dan Islam tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap asal muasal pembahasan tersebut.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis **penelitian pustaka (*library research*)** dengan mengumpulkan data yang diperoleh dan dikumpulkan. Kemudian, dianalisis dan dikembangkan secara menyeluruh atas referensi yang dipakai. Penelitian ini mendeskripsikan pilitik, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

Definisi Politik dan Demokrasi

Secara etimologi, kata politik berakal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota, kemudia berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, sehingga tersimpul: (1) *politeia* yang berarti semua orang yang berhubungan dengan negara; (2) *politika* yang berarti pemerintahan negara; (3) *politikos* yang berarti kewarganegaraan (Radinson Saragih, 2013). Jika ditinjau secara termonologi menurut Miriam Budiardjo, yang dikutip dari Aditya Basudewa, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan -perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Bersumber pada pegertian politik menurut para ahli di atas dapat didefinisikan bahwa politik merupakan cabang ilmu yang mengkaji dan menelaah kegiatan kepemerintahan negara dalam memperoleh keputusan-keputusan untuk kedamaian diantara masyarakat.

Menurut Asad (1954) yang dikutip oleh Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., M.Pd, politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Secara terminologi Islam, politik didefinisikan sebagai keefektifan umat manusia yang sesuai dengan syariat *syara'*.

Secara etimologi, kata demokrasi berakal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sehingga demokrasi dapat didefinsikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat.

Menurut Joseph A. Schmeter menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan instituisional untuk mencapai keputusan politik, dimana

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi didefinisikan sebagai sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Secara terminologi, demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem kepemerintahan dari rakyat oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Dalam perspektif Islam, demokrasi didefinisikan seperti yang telah diterapkan di negara-negara Barat dan diakui memiliki perbedaan perspektif di antara Islam dan demokrasi. Demokrasi sependapat dengan Islam seumpama terdapat penyesuaian penafsiran terhadap definisi demokrasi itu sendiri. Penyesuaian yang dimaksud penulis adalah adanya prinsip *syura* (musyawarah) dan adanya konsep *ijtihad* dan *ijma* (konsensus).

Paradigma Politik dan Demokrasi dalam Islam

Tidak adanya aksentuasi terhadap sistem politik sebagai pedoman negara secara kompleks telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Terdapat 3 paradigma yang berkembang tentang keterkaitan antara Islam dan politik, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Paradigma tradisional atau formalistik, bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik.
2) Paradigma sekunder, bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian barat, artinya tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.
3) Paradigma sustantivisstik, bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Pada hakikatnya, demokrasi merupakan kebebasan berpendapat dalam musyawarah dan perlakuan yang bersifat adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'kebebasan' berasal dari kata 'bebas' yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa).

Kebebasan demokrasi dalam Islam berprinsip pada musyawarah (*as-syura*), adil (*al-'aladah*), dapat dipercaya (*al-amanah*), tanggung jawab (*al-masuliyyah*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*) yang pernah diterapkan pada ke khalifahan nabi.

Etika Politik dan Demokrasi

Etika politik Islam merupakan seperangkat aturan dalam suatu negara dimana setiap orang harus bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an. Penerapan nilai-nilai etika tersebut berkaitan dengan teladan hidup Nabi Muhammad SAW. Tujuan politik adalah untuk mendeskripsikan perilaku politik dari sisi positif dan negatifnya.

Definisi etika politik mencakup tiga syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Berusaha hidup bersama dengan baik.
2) Upaya memperluas ruang ligkup kebebasan.
3) Pembangunan fasilitas yang adil.

Dalam perspektif Islam, politik mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Penjelasan tersebut ada pada QS An-Nisaa [4] 58-59:

وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ ۞
نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ ۚ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ بِهِ يَعِظُكُمْ

يوَأُولِ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرِ
ذَٰلِكَ ۚ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ

"Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS An-Nisaa [4] 58-59).

Ayat tersebut mendefinisikan bahwa etika politik memiliki keterkaitan yang erat terhadap rukum-rukum pemenuhan amanah, keadilan, ketataan kepada Allah SWT, para Rasul, dan Ulul Amri yang mengacu terhadap Allah SWT dan Rasulullah ketika dalam masalah.

Sesuai dalam pernyataam Al-Maragh, amanat memiliki beberapa uraian terkait definisi amanat itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut:

1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan.
2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya.
3) Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.

Secara etimologi, keadilan berasal dari kata sifat "adil" yang berarti sama. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an menjadi pilar utama kehadiran prinsip keadilan. Jika di dalamnya terdekeksi adanya kontradiksi, maka proses penyelesaian masalah dengan musyawarah sebagai metode konstruksi

hukum dalam pengambian keputusan politik dan merujuk kembali kepada Al-Qur'an serta As-Sunnah.

Secara etimologi, 'etika' berakar dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya kebiasaaan dalam tingkah laku manusia. Menurut Poedjawijatna, etika adalah filsafat tingkah laku (Ranti Rama Daniati, 2019).[1]

Etika berpolitik dalam Islam mengacu pada kajian Kitab Shahih Muslim yang merujuk pada dua unsur, bagi pimpinan atau pejabat dan bagi yang dipimpun. Bagi pemimpin atau pejabat dilarang meminta jabatan, karena akan menjadi beban yang berat. Seorang pemimpin harus memberi kemudahan bagi orang yang dipimpinnya. Selanjurnya, pemimpin harus memiliki bersikap adil, tidak bertindak kejam, sewenang-wenang, dzalim atau aniaya. Pejabat atau pimpinan tidak boleh melakukan Tindakan penyelewengan atau korupsi (ghulul). Rakyat yang diperintah harus tunduk kepada pemimpin. Tidak menyetujui perintah pemimpin mengarah pada Tindakan tidak bermoral dan illegal.

Berdasarkan realita yang ada, etika demokrasi memberikan prioritas pada kepentingan rakyat agar berada di puncak klasemen setelah kepentingan partai politik dan kekuasan semata.

Berdemokrasi tidak selalu mengenai 'kebebasan', meskipun demokrasi diciptakan berasaskan 'kebebasan'. Sebagai halnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi[18] 29:

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ
بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٣١

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia bermain, dan barangsiapa yang ingin (kafir)

[1] Beliau merupakan penulis makalah ***"Etika Demokrasi"*** dari **Universitas Pendidikan Indonesia**.

biarlah kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengapung mereka. Da²n jika mereka mminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi [18] 29).

Ayat tersebut mendefinisikan bahwa umatnya dipersilahkan merealisasikan 'kebebasan' tersebut dengan keterangan untuk tidak melewati batas. Sebagai sebuah perumpamaan, maraknya aksi protes yang dilakukan para demonstran belakangan ini menunjukkan bahwa, etika dalam berdemokrasi di Indonesia harus dievaluasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan fasilitas-fasiltas publik akibat aksi mereka. Kebebasan berpendapat inilah yang dimaksud firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal [8] 46:

ۖ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُوا۟ تَنَٰزَعُوا۟ وَلَا وَرَسُولَهُۥ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟
ٱلصَّٰبِرِينَ مَعَ ٱللَّهَ إِنَّ ۚ وَٱصْبِرُوٓا۟

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentr dan hilang kekuatamu dan bersabarlah. Sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar.

Tujuan Sistem Politik Islam

Secara harfiah, tujuan politik Islam adalah menegakkan negara Islam dengan hukum-hukum syari'ah yang sesuai dengan doktrinal Islam. Menurut Sukring[2], tujuan politik dalam pemerintahan Islam menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

1) Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam.
2) Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-prang yang berselisih.

[2] Beliau merupakan penulis ***Jurnal Andi Djemma "Politik Islam suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan"***.

3) Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.
4) Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia.
5) Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6) Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7) Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'.
8) Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir.
9) Mengangkat pegawai-pegawai yang cakap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara.
10) Menjalankan pergaulan dam pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi *al Din.*[3]

Kriteria Pemimpin berdasarkan Sifat Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhamad SAW merupakan seorang pemimpin bagi umat Islam yang memiliki kepribadian terpuji dan sempurna. Meneladani kepribadian beliau diterapkan dalam kepemimpinan politik Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai pada QS An-Nisaa [4] 58-59:

وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ
نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ ۚ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ بِهِ يَعِظُكُمْ

[3] ***al Din*** pembalasan dan perhitungan amal yang berhubungan dengan keagunan Tuhan.

وِلِيوَأُ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
هِاللَّ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرِ
كَذَٰلِ ۚ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ

"Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS An-Nisaa [4] 58-59).

Berdasarkan yang dikutip pada jurnal (Sakdiah, 2016) sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah, yang meliputi *shiddiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah*. Sifat-sifat tersebut dijadikan sebagai pilar utama karakteristik bagi seorang pemimpin dalam Islam.

1) *Shiddiq* (Benar dan Jujur)

   Rasulullah memiliki sifat jujur dan benar yang disebut shiddiq. karena kejujuran itulah beliau dihargai dan dihormati oleh setiap orang. tidak hanya itu, beliau juga dijadikan sebagai teladan bagi seorang pemimpin. pernyataan mengenai sifat kejujuran ini diperkuat oleh beberapa hadist yang dikutip dari (sakdiah, 2016):

   Ubaidillah Ibnush Shamit r.a. menuturkan bahwa, Rasulullah SAW bersabda. "*Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujurlah, tepatilah janji*

apaabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram)". (HR. Imam Ahmad).

Abdullah bin Mas'ud ra. menuturkan, Rasulullah saw. bersabda: "*Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkannya kepada surga. Dan senantiasa seseorang bersikap jujur dan terus berupaya menjaga kejujurannya sampai dengan dicatat di sisi Allah bahwa ia adalah seorang yang jujur. Janganlah sekali-kali kalian berdusta. Sebab, berdusta akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan perilaku maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya, seseorang yang berlaku dusta dan terus ingin berlaku dusta sehingga disisi Allah ia dicatat sebagai seorang pendusta*". (HR. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Abu hurairah r.a bersabda Nabi Muhammad saw: "*Ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah, tiada naungan kecuali naungan Allah: Imamfpemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah Orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya*". (HR. Bukhari dan Muslim)

2) *Amanah* (Dapat Dipercaya)

Amanah merupakan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. karakter ini seharusnya wajib dimiliki oleh seorang pemimpin seperti kepribadian Nabi Muhammad SAW setelah sifat kejujurannya.

terdapat beberapa pendapat menurut para muffasir mengenai definisi dan karakteristik amanah:

a. *Amanah* merupakan asas keimanan seperti yang telah disabdakan Nabi SAW bahwa "*tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah*" jadi seseorang tidak dianggap beriman kalau mereka tidak bisa melaksanakan sebuah amanah. Sebuah amanah memerlukan kepercayaan dan kepercayaan tersebut akan memberikan sebuah ketenangan batin dan imbasnya akan melahirkan sebuah keyakinan. Menurut Quraish Shihab, amanah tidak hanya bersifat material akan tetapi juga ada yang bersifat material yang pada intinya amanah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah.
b. Menurut Hamka dalam tafsirnya, ayat *amanah* tersebut menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga langit, bumi dan gunung-gunung pun tidak bersedia memikulnya, maka yang mampu mengemban amanah tersebut adalah manusia, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.

3) *Tabligh* (Menyampaikan Wahyu)

Salah satu sifat wajib Rasul Allah yang berarti "menyampaikan". bukan hanya sifat wajib Rasul, *tabligh* juga merupakan kewajiban dari setiap umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan (Amar ma'ruf) dan mengingatkan agar menjauhi dan meninggalkan perbuatan keji dan munkar (Nahyi Munkar) kepada saudara sesama muslim.

Allah berfirman didalam alqur'an yang memerintahkan tabligh kepada para utusan-Nya, yaitu dalam QS Al-Maidah [5] :

عَلۡتَفۡ لَّمۡ وَإِن ۖ رَّبِّكَ مِن إِلَيۡكَ أُنزِلَ مَآ بَلِّغۡ ٱلرَّسُولُ يَٰٓأَيُّهَا ۞
لَا ٱللَّهَ إِنَّ ۗ ٱلنَّاسِ مِنَ يَعۡصِمُكَ وَٱللَّهُ ۚ رِسَالَتَهُۥ بَلَّغۡتَ فَمَا
ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلۡقَوۡمَ يَهۡدِى

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir".

4) *Fathanah* (Kecerdasan)

Fathanah merupakan lawan dari sifat *baladah* (bodoh), *fathanah* berarti cerdas atau kecerdasan. Ini merupakan sifat wajib Rasul Allah terakhir yang harus diteladani dan menjadi syarat karakteristik bagi seorang pemimpin didalam Islam.

Seorang pemimpin harus memiliki sifat *fathanah*. Karena sebagai mualim yang menjadi panutan, kecerdasan sangat penting agar menjadi pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dalam memecahkan suatu permasalahan. Seperti Nabi Muhammad SAW, dengan kecerdasannya beliau mengatur strategi agar dapat menyebar dakwah Islam untuk mengajak umatnya kejalan yang benar.

Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan para Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran pada masing-masing umat yang ditekankan pada QS An-Nam [27] 90:

إِلَّا تُجۡزَوۡنَ هَلۡ ٱلنَّارِ فِى وُجُوهُهُمۡ فَكُبَّتۡ بِٱلسَّيِّئَةِ جَآءَ وَمَن
تَعۡمَلُونَ كُنتُمۡ مَا

"Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan".

Hubungan Demokrasi antara Islam dan Barat

Demokrasi berasal dari Barat yang berpandangan pada dunia sehingga demokrasi di mata Barat dan Islam menunjukkan duality yang bertolak belakang. Melalui pemaparan yang lebih rasional, demokrasi dalam Islam bersumber pada Kitab Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sedangkan demokrasi Barat berakar dari hasil pemikiran manusia.[4]

Menurut Aat Hayat (2015:402-404), terdapat perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim tebagi ke dalam beberapa kelompok.[5] *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi karena memiliki hubungan yang bersifat simbiosis-mutualisme. *Kedua*, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa Islam dan demokrasi memiliki hubungan yang canggung bahkan bertentangan. Sehingga hubungan keduanya bersifat antagonistic dan bertentangan karena demokrasi berasal dari Barat. *Ketiga*, kelompok ini menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi dengan memberikan catatan kritis. Artinya, kelompok ini tidak sepenuhnya menolak.

Demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah. Faktanya, musyawarah hanyalah sebagian kecil dari demokrasi itu sendiri. Kehadiran demokrasi dalam perspektif Islam yang bersumber pada Al-Qur'an memberikan warna yang berbeda dan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi. (Aat Hayat, 2015:418).

Konsep HAM dalam Perspektif Barat

[4] Aat Hidayat, *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an,* (Jawa Tengah, 2015), h. 402

[5] Muhammad Muslih, *Demokrasi,* dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* terj. Eva Y.N., dkk. (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 1, h. 361-365; Syukron Kamil, *Universitas Paramadina,* Vol. 3, No. 1, September 2003, h. 63-76.

Perbedaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam perspektif Barat dan Islam didasari karena adanya aspek yang saling berbanding terbalik. Pada bagian ini, perspektif barat memiliki konsep HAM yang berbeda. Mereka percaya bahwa khalikah hanya ditentukan oleh Negara dengan tujuan memoperoleh aturan publik.

Pandangan yang bersifat *anthroposentris* yang artinya manusia merupakan ukuran manusia sebagai sumber dari segalanya. Menurut Shihab dalam jurnalnya, di dalam perspektif Barat, manusia tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuhan.

Menurut Huda Kautsar Amin[6] dalam jurnalnya mengatakan bahwa konsep HAM telah berkembang sejak adanya *Magna Charta* tahun 1215 yang meupakan pelegalisasian HAM yang termuat dalam konstitusi kenegaraan di Inggris hingga padapiagamhak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB tahun 1948. Menangapi HAM dalam piagam PBB tersebut, sejumlah negara Musli seperti Sudan, Pakistan, Iran dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhentikan konteks budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat.[7]

Sejarah Hak Asasi Manusia

Dikutip dalam jurnal (Al Sayeed, 2022), sejarah HAM berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf inggris pada abad ke 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia,yaitu hak atas hidup,hak kebebasan dan hak milik. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu

1) *Magna Charta (1215)*

[6] Beliau merupakan penulis jurnal ***HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT.***

[7] **Ajat Sudrajat**, ***Khazanah Intelektual Politik Islam***. (Yogyakarta: True Media Utama, 2011)

Merupakan sebuah perjanjian antara Raja John dari inggris dengan bangsawan yang disebut *Magna Charta.* Perjanjian tersebut berisikan jaminan beberapa hak seperti tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan oleh pengadilan yang diberikan kepada para bangsawan beserta keturunannya.

2) Revolusi Amerika (1776)

   Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declarational of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu.

3) Revolusi Prancis.

   Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration droits de fhomme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*egality*), dan persaudaraan (*fraternite*). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedom*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt.

HAM dalam Perspektif Islam

Dalam Islam setiap aturan-aturan dibuat harus bersumber dari wahyu Allah, yang selaras dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ketetapan Allah. Seperti Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam juga telah diatur sedemikian rupa yang berpandangan pada Al-Qur'an. Seperti yang tertulis QS Al-A'Raf [7] 24 dan QS Al-Isra [17] 70.

حِينٍ إِلَىٰ وَمَتَٰعٌ مُسْتَقَرٌّ ٱلْأَرْضِ فِى وَلَكُمْ

"..Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang lama". [Q.S. al-A'raf (7):24]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri merka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Macam-Macam HAM dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya, manusia sudah memiliki dan menerima hak asasi berupa hak hidup, hak kemerdekaan, hak berpendidikan, dan sebagainya.

1) Hak Hidup

Dalam Islam, hidup didefinisikan sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Dapat dikatakan bahwasanya, tidak ada yang mampu menyaingi kekuasaan Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci. Hak hidup telah difirmankan Allah SWT dalam QS An-Nur [24] 27-28:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah

kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS An-Nur [24] 27-28).

2) Hak Kemerdekaan

Kemerdekaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kehidupan yang terhindar dari perbudakan. Vatin sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution mengatakan bahwa "*Setiap manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada percabutan ha katas kemerdekaan. Setiap individul mempunyai hak yang tidak terpisahkan atas segala bentuk kemerdekaan. Oleh karena itu, manusia perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran atas pencabutan itu".*[8]

3) Hak Berpendidikan

Sejatinya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akar fikiran dan berpotensi untuk berilmu.

Dikutip oleh Salim Bahreisy (Jahada, 2023), QS At-Thur [52] 1-3 merupakan salah satu ayat suci Al-Qur'an yang membahas ilmu, yang mana ayat tersebut menerjemahkan bahwa "*Demi gunung (Sinai), dan demi Kitab yang ditulis, pada lembaran yang terbuka*". Dirawayatkan oleh Attirmidziy, Anas ra bersabda, "*siapa yang keluar untuk menuntut ilmu makai a akan berjuang fisabilillah hingga Kembali".*

Perbedaan Prinsip antara Konsep HAM dalam Pandangan Islam dan Barat

Seperti yang telah dijelaskan pada HAM dalam perspektif Islam di atas, bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam berprinsip pada wahyu Allah dan ketetapan-Nya yang bersumber pada Al-Qur'an. Hal itu, berbanding terbalik dengan konsep HAM dalam pandangan Barat yang menganggap pola tingkah laku manusia hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara.

Kedua konsep tersebut tentu saja saling bertentangan satu sama lain, seperti yang dikutip dari (Huda Kausar Amin,2020) dalam jurnalnya, dunia

[8] Jahada, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Vol.6, 2023), h. 49.

Barat mempercayai pandangan bersifat *anthroposentris*[9], yaitu paham yang menganggap manusia menjadi ukuran terhadap suatu gejala dan sebagai pusat paling penting yang berpengaruh terhadap lingkungan. Sedangkan, Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris, bahwa Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia menyembah hanya kepada-Nya.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis **penelitian pustaka (*library research*)** dengan mengumpulkan data yang diperoleh dan dikumpulkan. Kemudian, dianalisis dan dikembangkan secara menyeluruh atas referensi yang dipakai. Penelitian ini mendeskripsikan pilitik, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.

6. Simpulan

Politik dan demokrasi merupakan sistem kepemerintahan yang banyak digunakan di negara-negara yang ada di dunia. Kedua hal tersebut berasal dari dunia Barat hingga akhirnya menyebar keseluruh dunia. Tersebarnya politik dan demokrasi menimbulkan keberagaman yang berbeda di setiap negara nya. Di negara bercorak Islam, meskipun sebagian masyarakat yang ada kontra terhadap sistem tersebut, faktanya banyak masyarakat yang justru mendukung siste tersebut dengan catatan bahwa hukum tersebut telah disesuaikan sesuai dengan ajaran agama dan berpedoman terhadap Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Adapun Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat ditolak oleh kedua belah pihak. Dengan adanya Al-Qur'an sebagai pedoman, Islam menghadirkan Hak Asasi Manusia yang lebih rasional dan dapat diterima pihak lainnya.

[9] Sebuah konsep yang berpusat pada manusia.

Penerapan politik, demokrasi, dan hak asasi manusia sangat diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, karena di dalamnya terdapat berbagai keselarasan sesuai dengan kaidah-kaidah terpuji yang dimiliki Islam dan tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap asal muasal topik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, I. (2011). POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Fiqh Politik Syar'I Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara). *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2.

Faisal Reza, S. (2019). Islam, Politik, dan Pemimpin yang Terbaik.

Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Islam.

Husin, Gusti Muhammad Irhamna., Arief, Ihsanul M., & Ainah, Noor. Yogyakarta: (2022). Islamic Studies Contemporary Issues

Hutabarat, C. C. (2015). Pemikiran Mohamad Hatta Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Islam .

Ilmi, M. M. (2019). Konsep Al-Din Dalam Al-Quran: Telaah Semiosis Perspektif Charles Sanders Peirce. *Journal*.

Jahada, J. (2013). Hak Asasi Manusia Menurut Alquran.

Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikann dan Keguruan*.

Jatiwarso, M. D. (n.d.). Konsep HAM Dalam Perspektif Islam Dan Barat.

Kadir, M. A. (2016). Eksistensi Ulama dan Politik Islam. *AL-IJTIMA'I International Journal of Government and Social Science*.

Nawawi, I. (2011). Politik Dalam Perspektif Islam (Kajian Fiqh politik Syar'I Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara). *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* .

Novalialubis. (2016). HAM Dalam Perspektif Islam Dan Barat.

Rohman, A., Bandruzaman, A., & Huda, N. (2020). Masa depan Demokrasi Islam Di Indonesia. *Journal*.

Zawawi, A. (2015). POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM. *Artikel*.